TUGAS PENDIDIKAN PANCASILA

MAKALAH TENTANG: ESENSI DAN URGENSI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

DOSEN:LAURENSIUS ARLIMAN,SE,SH,MH,Mkn

DISUSUN OLEH:

NAMA:RISKI DIGO SAPUTRA

NIM:20220083

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ESENSI DAN URGENSI PANCASILA EBAGAI DASAR NEGARA”. Makalah ini berisi tentang esensi dan urgensi pancasila sebagai dasar negara, hubungan pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI, hubungan pancasila dengan pembukaan UUD 1945, penjabaran pancasila dalam pasal-pasal UUD NKRI.

Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami meminta saran dan kritik yang membangun agar kedepannya kami dapat membuat suatu makalah yang lebih baik lagi. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Lubuk pinang, 29 januari 2021

DAFTAR ISI

BAB I.PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2.....Rumusan Masalah	5
1.3.....Tujuan	5
BAB II. PEMBAHASAN	6
2.1 Esensi pancasila sebagai dasar negara.....	6
2.2 Urgensi pancasila sebagai dasar negara.....	9
BAB III. KESIMPULAN	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam hidup berbangsa dan bernegara terkadang masyarakat merasa bingung dimana yang lebih penting antara bangsa dan negara dan terkadang malah menyepelekan keduanya. Negara adalah organisasi kekuasaan dari persekutuan hidup manusia, sedangkan bangsa lebih menunjuk pada persekutuan hidup manusia. Suatu negara pasti mempunyai identitas nasional sendiri-sendiri yang berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain karena, identitas nasional suatu bangsa menunjukkan kepribadian suatu bangsa tersebut

Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia, sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia, Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain pengamalan Pancasila sebagai dasar Negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai *weltanschauung*, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat.

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya sebagai dasar Negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara. Artinya pancasila

merupakan satu ideologi yang dianut oleh Negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan kita. Bila terjadi kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, kita harus kembali kepada filsafat Negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan kembali.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana esensi dan urgensi pancasila sebagai dasar negara ?

1.2 TUJUAN

Agar pembaca mengetahui Bagaimana esensi dan urgensi pancasila sebagai dasar negara

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Esensi pancasila sebagai dasar negara

Esensi yang berasal dari kata *essence* yang menurut kamus Longman berarti the most basic and important quality of something, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) esensi adalah kata benda yang artinya hakikat; inti; hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah: *Esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi*. Jadi segala sesuatu yang merupakan Hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya.

Dalam sila-sila pancasila terdapat patologi budaya pancasila, yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai pancasila. Jika dasar pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara, pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Memang tidak dijajah dalam hal fisik tetapi dijajah dalam hal pemikiran yang secara perlahan-lahan membuat berubah rakyat Indonesia dari sila-sila pancasila itu sendiri.

Beberapa contoh penerapan esensi pancasila sebagai dasar negara :

1. Sila pertama

Ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradap. Contohnya rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain.

2. Sila kedua

Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa

Indonesia, dan hak. Contoh penerapannya, majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak kepembantunya yang tidak berperikemanusiaan.

3. Sila ketiga

Persatuan Indonesia artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya, tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik.

4. Sila keempat

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan kementraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut.

5. Sila kelima

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Contohnya pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membedakan-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah.

Selain itu juga, demokrasi diakui di Indonesia. Demokrasi penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena dengan adanya demokrasi yang benar tindakan semena-mena penguasa dapat dihindari. Penyebabnya adalah karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi sehingga pemimpin harus melayani rakyat. Inilah makna dari pengamalan

silanya ke empat dalam kehidupan bersama yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Setelah itu, masalah akan bisa terselesaikan dengan solusi yang terbaik, solusi yang tidak merugikan siapapun, dan juga tidak ada kekerasan fisik. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan sama di mata hukum. Hukum tidak pandang bulu dan menghukum siapapun sesuai dengan peraturan. Hal ini penting bagi kehidupan masyarakat supaya pelaku kriminal dapat ditangkap dan diperlakukan sama tanpa mampu melakukan suap. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berujung perpecahan. Inilah makna dari pengamalan sila ke lima Pancasila dalam kehidupan bersama yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia penting untuk diamalkan.

Dari contoh diatas tampak bahwa Pancasila berperan penting sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila menghargai seluruh umat beragama di Indonesia, tanpa mengutamakan atau membedakan salah satu golongan agama. Pancasila ini menjadi lebih sesuai bagi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam agama. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa tidak akan lupa akan Tuhan Yang Maha Esa, yang akan membuat sikap kita menjadi lebih bermartabat dan memiliki nilai moral yang baik, selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, selalu berusaha untuk bersikap adil dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, gotong royong dan sikap tidak egois serta akan tercipta kehidupan yang aman, damai dan tentram, perpecahan pun tak akan terjadi jika terjadi salah paham.

Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dihargai keberadaannya dan di amalkan nilai-nilainya karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah. Pancasila lahir dari ide pikiran pemimpin bangsa ditengah kondisi Indonesia yang penuh tekanan, perbedaan, dan himpitan dari para penjajah yang semena mena mengeksploitasi dan memperbudak negara Indonesia seandainya saja. Pancasila adalah alat pemersatu yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan sebagai pijakan, dasar dan pondasi yang biasa dikenal dengan pilar – pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai – nilai yang ada di Indonesia sehingga sangatlah cocok bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Bukan hanya semata untuk provokasi atau penyemangat saja dalam pengusiran penjajah, melainkan juga untuk tujuan seumur hidup bangsa Indoenesialah , Pancasila itu dirumuskan.

2.2 Urgensi Pancasila sebagai dasar negara

Ir. Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah *Weltanschauung*, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme.

Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua pendekatan yaitu, Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia seperti, masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan RAS.

Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi juga yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*, antara lain transparan, akuntabel, dan *fairness* sehingga akan terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis, harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan *free fight liberalism*, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik. Maka Indonesia

akan mencapai tujuan yang di cita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

- 1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah,
- 2) dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

BAB III

PENUTUP

3.1.KESIMPULAN

Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan Hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya.

Ir. Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah *Weltanschauung*, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan menenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme.

Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara merupakan unsur penentu daripada ada dan berlakunya tertib hukum bangsa Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental. Sedangkan proklamasi merupakan titik

kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka yang disemangati oleh jiwa Pancasila. Perjuangan bangsa Indonesia ini kemudian dijiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan terdapat pada berbagai bidang kehidupan negara yaitu bidang ekonomi, bidang politik, sosial budaya, dan hankam.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.